



2025

RENJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SAROLANGUN

- www.sarolangunkab.go.id
- www.diskominfosrl.go.id



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Kab. Sarolangun Kode Pos. 37481 ☎ (0745) 91636 Fax. (0745) 91100
Website: www.sarolangunkab.go.id e-mail: diskominfo@sarolangunkab.go.id

SAROLANGUN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR : 05 TAHUN 2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025**

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu dan terarah, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Permenkominfo RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
 8. Permendagri RI Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
 9. Permendagri RI Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Permendagri RI Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 3283);
 11. Peraturan Presiden Nomor 53 tahun 2023 Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, Tentang Standar Harga Satuan Regional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
 12. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial Oleh Pemerintah Daerah;
 13. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan informasi di Pemerintah Daerah;
 14. Intruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah yang dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022;
 15. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2020 tentang Uruain Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun;
 16. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun;
 17. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagian Kesembilan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
 18. Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2022 Tentang Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan.....

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Pengolahan data informasi;
 - b. Menganalisis gambaran kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah;
 - d. Perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Perumusan capaian program kegiatan dan sub kegiatan serta kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun;
 - f. Perumusan indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak Januari 2024 hingga 31 Desember 2024.

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


H. AHMAD NASRI, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 19671110 199703 1 004

LAMPIRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SAROLANGUN
NOMOR : 05 TAHUN 2024
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2025.

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun
3.	Anggota :	1. Kepala Bidang Teknologi Informasi Komunikasi & e-Government 2. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 3. Kepala Bidang Statistik Sektoral 4. Kepala Bidang Keamanan Informasi dan Persandian 5. Perencana Ahli Muda 6. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 7. Staf Perencana (Yesi Gusmaniar) 8. Staf Keuangan (Mega Mustika, S,ST)

Ditetapkan di : Sarolangun
Pada tanggal : 17 Januari 2024

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


 * H. AHMAD NASRI, SH
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19671110 199703 1 004

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya Rencana Kerja (RENJA) Tahun Anggaran 2025 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat diselesaikan.

Sesuai Permendagri Republik Indonesia No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Dinas Kominfo telah menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026, Renstra dan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.

Rencana Kerja Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun memuat program kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan pemutakhiran kepmendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya serta informasi tentang rencana capaian kinerja dan rancangan dana indikatif yang dibutuhkan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan kondisi keuangan daerah.

Demikian semoga Bermanfaat.

Sarolangun, 31 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN

AHMAD NASRI, S.H
Pembina Utama Muda / IV.c

DAFTAR ISI

SK Rencana Kerja.....	ii
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PD TAHUN LALU (2023).....	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023 & Capaian Renstra PD.....	7
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD.....	16
2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi PD.....	19
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	20
2.5. Penelahaan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat.....	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD.....	33
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	33
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD.....	35
3.3. Program dan Kegiatan.....	38
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PD.....	43
BAB V PENUTUP.....	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	8
Tabel 2.2.....	17
Tabel 2.4.....	21
Tabel 2.5.....	32
Tabel 3.1.....	34
Tabel 3.2.....	37
Tabel 3.3.....	39
Tabel 4.1.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun merupakan salah satu Instansi Teknis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagian Kesembilan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Bupati tersebut diatas bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian.

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, sampai ke Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah tergambar tentang keseriusan upaya pemerintah dalam menerapkan pemanfaatan TIK disektor Pemerintahan atau yang secara populer disebut sebagai e-Government dan diamanatkan dalam bentuk konsep *Smart Government* di Kabupaten Sarolangun.

Untuk mewujudkan itu perlu adanya dukungan dana atau sarana penunjang dalam penyediaan data dan informasi berupa perangkat keras dan lunak sebagai sarana penunjang pengolahan data guna mewujudkan ketersediaan informasi secara elektronik. Disamping itu peralatan dapat beroperasi secara maksimal harus didukung oleh SDM yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, sehingga menghasilkan data dan informasi yang akurat dan tepat waktu.

I.2. LANDASAN HUKUM.

a. Undang – Undang :

1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik(Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

b. Peraturan Pemerintah.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

c. Peraturan Presiden :

1. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
2. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 33).

d. Instruksi Presiden.

1. Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategis Pengembangan e-Government;
2. Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
3. Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017.

e. Permen dan Keputusan Menteri.

1. Peraturan Menkominfo RI Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tatacara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
2. Peraturan Menkominfo RI Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial.
3. Peraturan Menkominfo RI Nomor 22 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menkominfo RI Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
5. Peraturan Menkominfo RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
6. Peraturan Menkominfo RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Peraturan Menkominfo RI Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo.
8. Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Permendagri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
 10. Permendagri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)
 11. Peraturan Menkominfo RI Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 13. Intruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022
 14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral Oleh Pemerintah Daerah;
 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian untuk pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;

f. Perda dan Perbup.

1. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.
2. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Susunan Perangkat Daerah setelah penyederhanaan Birokrasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun bagian Kesembilan Belas Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun.
3. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 24 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025.

4. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2025 (Lembar Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 Nomor 2);

I.3. MAKSUD DAN TUJUAN.

Rencana Kerja Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan selama 1 (satu) Tahun dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023-2026.

Dan beberapa tujuan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah:

1. Untuk Acuan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan di tuangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) untuk Tahun Anggaran 2025;
2. Untuk dasar pokok pelaksanaan program kegiatan pelaksanaan dari Renstra PD dan bahan tolok ukur untuk mencapai target dari Renstra Perangkat Daerah;
3. Untuk bahan monitoring/evaluasi Rencana Kerja Tahun 2025;
4. Untuk dasar penilaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.

Sistematika penyusunan rencana kerja ini berpedoman kepada Permendagri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama (Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008), sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN meliputi sub bab yaitu Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penyusunan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU meliputi sub bab yaitu Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian Renstra PD, Analisis Kinerja Pelayanan PD, dan Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD, Review terhadap Rancangan Awal RKPD dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PD meliputi sub bab yaitu: Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, Tujuan dan Sasaran Renja PD serta Program dan Kegiatan.

BAB VI RENCANA KERJA & PENDANAAN PD memuat Matrik Renja pada aplikasi SIPD pada tahapan Rancangan Akhir RKPD

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2023 dan Capaian Renstra PD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 Nomor 1) bahwa pada Tahun 2023 Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar **Rp. 8.308.052.943,-** (*Terbilang Delapan Milyar Tiga Ratus Delapan Juta Lima Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) terdiri dari Belanja Operasi **Rp. 8.130.631.943,-** (*Terbilang Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Juta Enam Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah*) dan Belanja Modal sebesar **Rp. 177.421.000,-** (*Terbilang Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah*) yang dijabarkan dalam 5 (Lima) Program 12 (Dua Belas) Kegiatan dan 41 (Empat Puluh Satu) Sub Kegiatan, dari alokasi tersebut terealisasi sebesar **Rp. 7.850.228.170,-** (*Terbilang Tujuh Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Tujuh Puluh Rupiah*) atau sebesar **94,49%**

Realisasi anggaran dan kinerja sampai dengan tahun berjalan dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2023 dan Pencapaian Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika s.d Tahun 2024 (Tahun Berjalan)*
Kabupaten Sarolangun

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	$7=(6/5*100)$	8	9	$10=(9/4)*100$	11
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PREDIKAT SAKIP	B	Rp4.678.853.643	Rp4.275.401.178	91%	BB	100	100	
2	16	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dok/Lap	Rp 64.275.200	Rp 63.868.243	99%	8 Dok/Lap	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	8	9	10=(9/4)*100	11
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dok	Rp 27.411.200	Rp 27.209.200	99%	3 Dok	100	100	
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	Rp 25.000.000	Rp 24.999.043	100%	2 Laporan	100	100	
2	16	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp 11.864.000	Rp 11.660.000	98%	5 Laporan	100	100	
2	16	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan daerah	40 Dok/Lap	Rp3.472.301.123	Rp3.096.533.313	89%	40 Dok/Lap	100	100	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	Rp3.273.976.623	Rp2.901.954.913	89%	30 Orang	100	100	
2	16	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	Rp 160.987. 500	Rp 158.737.500	99%	12 Dokumen	100	100	
2	16	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dok	Rp 16.058.000	Rp 15.722.000	98%	1 Dok	100	100	
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Lap/Dok	Rp 21. 279.000	Rp 20.118.900	95%	13 Lap/Dok	100	100	
2	16	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	100	Rp 66.800.000	Rp 61.174.804	92%	35	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	8	9	10=(9/4)*100	11
2	16	1	2.05	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	42 Stel	Rp 16.800.000	Rp 16.550.100	99%	42 Stel	100	100	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	Rp 50.000.000	Rp 44.624.704	89%	7 Orang	100	100	
2	16	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Rp 261.189.200	Rp 261.188.680	100%	70	100	100	
2	16	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 5.195.800	Rp5.195.800	100%	1 Paket	100	100	
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	Rp 60.079.200	Rp 60.079.200	100%	1 Paket	100	100	
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	Rp 15.015.000	Rp 15.015.000	100%	2 Paket	100	100	
2	16	1	2.06	5	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	4 Laporan	Rp 7.499.200	Rp 7.499.200	100%	4 Laporan	100	100	
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp120.000.000	Rp119.999.480	100%	12 Laporan	100	100	
2	16	1	2.06	1	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dok	Rp53.400.000	Rp53.400.000	100%	12 Dok	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	8	9	10=(9/4)*100	11
2	16	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang yang tersedia	1 Unit	Rp185.968.010	Rp174.580.010	94%	1 Unit	100	100	
2	16	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	Rp185.968.010	Rp174.580.010	94%	1 Unit	100	100	
2	16	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Laporan Penyajian Jasa Penunjang Urusan Pemda	26 Laporan	Rp383.393.860	Rp374.169.928	98%	26 Laporan	100	100	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	Rp5.500.000	Rp5.500.000	100%	1 Laporan	100	100	
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	Rp128.968.010	Rp120.633.628	94%	12 Laporan	100	100	
2	16	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	Rp45.328.800	Rp45.036.300	99%	1 Laporan	100	100	
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	Rp204.000.000	Rp203.000.000	100%	12 Laporan	100	100	
2	16	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara	72 Unit	Rp244.926.250	Rp243.886.200	100%	72 Unit	100	100	
2	16	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Pajak dari Kendaraan Perorangan Dinas / Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-1 Unit	Rp32.000.000	Rp31.698.000	99%	1 Unit	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	8	9	10=(9/4)*100	11
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan,Pajak,dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	Rp64.000.000	Rp63.293.200	99%	8 Unit	100	100	
2	16	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	Rp101.361.250	Rp101.330.000	100%	62 Unit	100	100	
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Rp47.565.000	Rp47.565.000	100%	1 Unit	100	100	
2	16	2			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	PERSENTASE INFORMASI PUBLIK YANG DIPUBLIKASIKAN	98%	Rp974.468.060	Rp941.736.511	97%	89,33	100	100	
2	16	2	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	Rp974.468.060	Rp941.736.511	97%	100	100	100	
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	1 Dok	Rp9.319.900	Rp9.202.535	99%	1 Dok	100	100	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	12 Dok	Rp43.800.000	Rp41.800.000	95%	1 Dok	100	100	
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	Rp29.000.000	Rp28.805.000	99%	1 Media	100	100	
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dok	Rp23.321.800	Rp23.185.160	99%	1 Dok	100	100	

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	8	9	10=(9/4)*100	11
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	10 Layanan	Rp1.723.116.900	Rp1.690.619.754	98%	5 Layanan	100	100	
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	1 Dok	Rp6.300.000	Rp6.031.000	96%	1 Dok	100	100	
2	16	3	2.01		PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI DAN INFORMATIKA	PERSENTASE PENGELOLAAN SPBE	100	Rp229.585.600	Rp227.825.800	99%	62,5	100	100	
2	16	3	2.01		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp1.385.026.650	Rp1.375.376.400	99%	40	100	100	
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	35 Jaringan	Rp1.385.026.650	Rp1.375.376.400	99%	35 Jaringan	100	100	
2	16	3	2.02		Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100	Rp94.585.600	Rp92.994.300	98%	45	100	100	
2	16	3	2.02	8	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Unit	Rp49.950.000	Rp49.835.000	100%	1 Unit	100	100	
					Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City	1 Dokumen	Rp83.578.500	Rp83.555.460	100%	1 Dokumen			

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	8	9	10=(9/4)*100	11
2	16	3	2.02	1	Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE	4 Dok	Rp93.786.200	Rp92.337.634	98%	1 Dok	100	100	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	PERSENTASE PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	60	Rp75.460.350	Rp75.095.850	100%	60	100	100	
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	60	Rp75.460.350	Rp75.095.850	100%	60	100	100	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan Pengolahan, Analisa dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	2 Dok	Rp53.200.000	Rp52.990.500	100%	2 Dok	100	100	
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	Rp1.000.000	Rp900.000	90%	1 Dok	100	100	
2	20	2	2.01	4	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS	32 Orang	Rp19.276.600	Rp19.221.600	100%	32 Orang	100	100	
2	20	2	2.01	6	Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dok	Rp1.983.750	Rp1.983.750	100%	1 Dok	100	100	
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target capaian kinerja Renstra PD Tahun 2026 (akhir periode Renstra PD)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan PD Tahun 2023			Target Program /Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2024		C A T A N
								Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Perkiraan Realisasi Capaian	Perkiraan Tingkat Capaian (%)	
1					2	3	4	5	6	7=(6/5*100)	8	9	10=(9/4)*100	11
2	21	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	INDEKS KEAMANAN INFORMASI (KAMI)	200 Point	Rp106.539.000	Rp98.983.199	93%	Rendah (244) Point	100	100	
2	21	2	2.01		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	60	Rp106.539.000	Rp98.983.199	93%	60	100	100	
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12 Lap	Rp56.116.500	Rp53.210.199	95%	12 Lap	100	100	
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Lap	Rp17.792.900	Rp17.782.400	100%	2 Lap	100	100	
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	17 OPD	Rp32.629.600	Rp27.990.600	86%	17 OPD			
								Rp8.308.052.943	Rp7.850.228.170	94%	-	100	100	

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan merumuskan kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Sarolangun Nomor 35 Tahun 2022.

Dalam hal menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pelaksanaan pembinaan dibidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
4. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan;
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Sarolangun sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2023 telah sesuai dengan target dan capaian yang telah ditentukan. Namun ada beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika 2023-2026 yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan alokasi anggaran, sehingga dilakukan pemilihan kegiatan yang sifatnya wajib, prioritas dan rutin.

Selanjutnya, sebagai alat pengukuran kinerja pelayanan PD disampaikan IKU (Indikator Kinerja Utama) diambilkan dari target Renstra, yang terangkum dalam Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2
Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	IKU	FORMULASI		TARGET	CAPAIAN
						TAHUN 2023	
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Pelayanan TIK	- Program Pengelolaan Aplikasi Informatika - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks SPBE	Laporan Hasil Evaluasi SPBE, Kementerian PANRB Tahun 2022 memperoleh Indeks 2,63 (Kategori Baik)		2.65	2,63 (Baik)
2	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	$\frac{\text{Jumlah Informasi yang disampaikan PPID}}{100\% \text{ Jumlah Informasi yang disediakan PPID}}$	$\frac{122}{122} \times 100\%$	100%	100%
3	Pengelolaan Data Statistik Sektoral	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Statistik Sektoral	$\frac{\text{Jumlah PD yang menginput Data}}{\text{Total PD}} \times 100\%$	$\frac{29}{30} \times 100\% = 97\%$	60%	97%
4	Meningkatkan keamanan informasi Pemerintah Daerah	Program Penyelenggaraan Perssandian untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Perhitungan Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Dari hasil assessment secara mandiri		200 Point	240 Point

2.3. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kominfo Kabupaten Sarolangun

Pada Tahun 2023 lalu Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun pedoman dalam melaksanakan alih pengetahuan dan pengalaman *best practices* antar aparaturnya pemerintah (*city sharing*) menciptakan sinergitas penyelenggaraan pembangunan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah guna mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bertujuan untuk percepatan pembangunan daerah, peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya daerah.

Seiring kemajuan teknologi Informasi dan Komunikasi menjanjikan efisiensi, kecepatan dan penyampaian informasi yang dapat memudahkan di dalam pengaturan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, dalam era industri 4.0 ini setiap pemerintahan atau otonomi daerah termasuk Kabupaten Sarolangun dituntut mampu mewujudkan pemerintahan yang mengacu pada prinsip – prinsip *Smart Government*. Upaya agar terciptanya *Smart Government* di Kabupaten Sarolangun salah satu nya ialah menggunakan atau memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi atau istilah poplurnya ialah *e-Government*. Pelaksanaan *e-Government* yang telah di implementasikan harus dapat memenuhi harapan dan kebutuhan dari internal pemerintahan, masyarakat dan juga pihak – pihak yang bekerjasama dengan pemerintahan Kabupaten Sarolangun. Dan pemerintahan Kabupaten Sarolangun dalam bidang Statistik memfokuskan 1 (satu) data.

Analisa untuk terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang *Smart Government* merupakan hal yang sangat penting, dalam rangka menentukan faktor-faktor kunci sebagai penentu keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam bentuk isu-isu strategis. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan dalam bentuk review pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat disimpulkan bahwa kinerja pelayanan yang telah dilakukan telah berjalan dengan baik, namun pun demikian sebagaimana pada umumnya yang terjadi pada pelayanan Pemerintahan Daerah tetap mendapatkan atau menemui berbagai macam persoalan atau hambatan

yang sangat krusial dalam pengembangan teknologi komunikasi dan informasi. Adapun hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang terampil dan professional di bidang teknologi informasi dan komunikasi, statistik dan Persandian.
2. Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi yang telah dibangun Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun oleh PD lingkup Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
3. Belum optimalnya upaya pemberdayaan potensi komunikasi masyarakat.
4. Belum optimal akses jaringan telekomunikasi dan internet diberbagai kecamatan terutama daerah pedalaman masih sangat rendah.
5. Belum optimalnya penyediaan sarana dan pembangunan infrastruktur komunikasi publik yang berkualitas.
6. Belum optimalnya fasilitas dan infrastruktur untuk statistika dalam mewujudkan bidang statistic yang focus mencanangkan pemerintahan Kabupaten Sarolangun 1 (satu) data.

Berdasarkan hal tersebut tentunya akan berdampak kepada upaya pencapaian optimalisasi pada pelayanan komunikasi dan informasi yang ada di wilayah Kabupaten Sarolangun dalam mewujudkan smart government. Adapun isu yang dapat dimunculkan untuk pembangunan pada Tahun 2025 berdasarkan permasalahan yang dianggap krusial tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi (*e-Government*) dalam pengambilan kebijakan di bidang pembangunan di Kabupaten Sarolangun.
2. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap keterbukaan informasi.
3. Kurangnya kemampuan memberdayakan potensi komunikasi masyarakat.
4. Satu data untuk pembangunan Sarolangun.
5. Layanan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau layanan Online.
6. Tuntutan publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.
7. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai bagian dari proses penyusunan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD dalam menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Pada dasar Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 mengalami perubahan terhadap rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.13.17 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas keputusan Mendagri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 Peraturan Menkominfo No. 8 Tahun 2019 sifat tupoksi pada Dinas Komunikasi dan Informatika banyak yang bersifat kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan tupoksi anggaran yang sudah jelas. Namun, untuk perencanaan dan perubahan Anggaran Tahun 2025 lebih memaksimalkan dan meningkatkan peran Dinas dan hal pengelolaan Komunikasi dan Informatika, data statistik sektoral dan keamanan informasi ada beberapa kegiatan tambahan maupun kegiatan lanjutan yang ada pada Tahun 2024 dimana memerlukan tambahan anggaran untuk optimalisasi kegiatan sebagaimana terlihat pada tabel berikutini:

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					Dinas Komunikasi dan Informatika					8.910.631.409,00					9.656.500.000,00			
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					8.910.631.409,00					9.656.500.000,00			
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					8.472.758.349,00					9.180.500.000,00			
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.900.855.199,00					6.055.500.000,00			
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					134.429.095,00					170.000.000,00			
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
						Predikat SAKIP	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Predikat	3 Dokumen	-	62.304.660,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	75.000.000,00	
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD													
						Predikat SAKIP	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Predikat	3 Laporan	-	30.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan	35.000.000,00	
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													
						Predikat SAKIP	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Predikat	2 Laporan	-	11.025.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan	15.000.000,00	
2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
						Predikat SAKIP	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Predikat	1 Dokumen	-	19.712.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00
2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah													
						Predikat SAKIP	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	BB Predikat	4 Data	-	11.386.935,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data	20.000.000,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								4.092.791.679,00					4.055.000.000,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
						-	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Orang/bulan	-	3.915.597.679,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	3.800.000.000,00
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN													
						-	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Dokumen	-	134.040.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	200.000.000,00
2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD													
						-	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	4 Dokumen	-	19.774.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen	20.000.000,00
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD													

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					-	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	23.380.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	35.000.000,00	
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							1.830.000,00					2.500.000,00	
2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
					-	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	1.830.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	2.500.000,00	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							152.692.500,00					236.000.000,00	
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
					-	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Paket	-	42.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	50 Paket	30.000.000,00	
2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
					-	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	10.192.500,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	6.000.000,00	
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
					-	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Orang	-	100.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang	200.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								348.168.915,00					379.000.000,00
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
						Predikat SAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	1 Paket	75 %	7.252.875,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8.000.000,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
						Predikat SAKIP	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	1 Paket	75 %	85.886.250,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	90.000.000,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
						Predikat SAKIP	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	2 Paket	75 %	15.329.790,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	25.000.000,00
2	16	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
						Predikat SAKIP	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	4 Laporan	75 %	16.500.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan	20.000.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
						Predikat SAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	4 Laporan	75 %	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	170.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD													
					Predikat SAKIP	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	B Predikat	1 Dokumen	75 %	73.200.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	66.000.000,00	
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								201.648.170,00					295.000.000,00
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel													
					-	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	6 Unit	-	124.010.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	6 Unit	200.000.000,00	
2	16	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya													
					-	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Unit	-	57.638.170,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	3 Unit	70.000.000,00	
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					-	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	20.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	25.000.000,00	
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								515.774.840,00					488.000.000,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	6.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	8.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	145.568.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	200.000.000,00	
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	40.206.840,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	60.000.000,00	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
					-	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	12 Laporan	-	324.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220.000.000,00	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								453.520.000,00					430.000.000,00
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
					-	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Unit	-	55.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	55.000.000,00	
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
					-	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	8 Unit	-	161.880.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	75.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
					-	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	62 Unit	-	86.640.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	62 Unit	150.000.000,00	
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
					-	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Unit	-	150.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	150.000.000,00	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK								1.108.706.000,00					1.210.000.000,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota								1.108.706.000,00					1.210.000.000,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media													
					-	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	938.506.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan	1.000.000.000,00	
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat													
					-	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	2 Komunitas	-	11.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas	10.000.000,00	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik													
					-	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Permohonan	-	55.400.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	1 Permohonan	75.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik													
					-	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Rekomendasi	-	15.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	1 Rekomendasi	25.000.000,00	
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
					-	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Media	-	40.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	1 Media	45.000.000,00	
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten													
					-	Jumlah Konten Informasi Publik	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Konten	-	43.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Konten Informasi Publik	1 Konten	45.000.000,00	
2	16	02	2.01	0024	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik													
					-	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Orang	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	1 Orang	10.000.000,00	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA									1.463.197.150,00				1.915.000.000,00
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota									1.463.197.150,00				1.915.000.000,00
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda													
					-	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	176.490.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan	200.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	16	03	2.02	0016	Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah													
					-	Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	62.044.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional	1 Dokumen	70.000.000,00	
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi													
					-	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	26.715.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen	30.000.000,00	
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah													
					-	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	3 Aplikasi	-	42.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	3 Aplikasi	15.000.000,00	
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota													
					-	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34 Perangkat Daerah	-	195.948.150,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	34 Perangkat Daerah	300.000.000,00	
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE													
					-	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	34 Perangkat Daerah	-	960.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	34 Perangkat Daerah	1.300.000.000,00	
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK								155.071.000,00				180.000.000,00	

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL							155.071.000,00					180.000.000,00	
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota							155.071.000,00					180.000.000,00	
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral													
						-	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	35 Orang	-	40.518.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	35 Orang	45.000.000,00
2	20	02	2.01	0009	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral													
						-	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	50 Persentase	-	20.003.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	50 Persentase	40.000.000,00
2	20	02	2.01	0010	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia													
						-	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	94.550.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Dokumen	95.000.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							282.802.060,00					296.000.000,00	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI							282.802.060,00					296.000.000,00	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota							282.802.060,00					296.000.000,00	
2	21	02	2.01	0001	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
						-	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Dokumen	-	5.000.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	1 Dokumen	6.000.000,00

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
					-	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	69.060.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	65.000.000,00	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik													
					-	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	1 Laporan	-	22.942.060,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	25.000.000,00	
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
					-	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	-	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	-	10 Perangkat Daerah	-	185.800.000,00	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	10 Perangkat Daerah	200.000.000,00	
TOTAL												8.910.631.409,00					9.656.500.000,00	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten Sarolangun Tahun 2024 untuk Program Kegiatan Masyarakat Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun tidak menerima usulan dari masyarakat disebabkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Terbatasnya Kemampuan APBD Kabupaten Sarolangun untuk Pengembangan Jaringan Intranet di Wilayah Kecamatan/Kelurahan dalam Kabupaten Sarolangun.
2. Mengingat Program Pemerintah Provinsi tentang Internet Desa melalui kegiatan DUMISAKE telah berakhir pada Tahun 2024 maka usulan masyarakat wilayah Blank Spot dapat diusulkan ke BAKTI Kominfo Pusat
3. Bahwa Dana Desa (DD) dapat dimanfaatkan untuk alokasi pengadaan akses internet.

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan
		NIHIL			

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

////////////////////////////////////

3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Sasaran dan arah kebijakan pemerintah terkait urusan Kominfo Tahun 2025 adalah untuk mengoptimalkan manfaat teknologi untuk pembangunan ekonomi, sosial, dan kemasyarakatan dapat kita lihat pada tabel 3.1 berikut :

Sasaran Pembangunan (7)			arah kebijakan Pemerintah	Program	Kegiatan
Program	Kegiatan	Target			
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	3,00	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru (4)	Keamanan siber, sandi, dan sinyal	- memperkuat keamanan teknologi informasi telekomunikasi; - pengembangan sumber daya manusia, peningkatan profesionalisme, dan kesejahteraan sumber daya manusia keamanan siber, sandi, dan sinyal; - penguatan kelembagaan keamanan siber, sandi, dan sinyal; serta - penguatan operasi keamanan siber, sandi, dan sinyal strategis.
			Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi (14)	Melanjutkan pembangunan infrastruktur	- membangun infrastruktur digital dan teknologi secara merata di kabupaten/kota di Indonesia sehingga tidak ada desa yang tidak terakses internet atau internet sinyal lemah; serta - memperkuat konektivitas digital di seluruh wilayah untuk seluruh kelompok masyarakat.
			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan (28)	Tata kelola pemerintahan juga didukung oleh transformasi digital dan inklusivitas pelayanan public	- menciptakan pemerintahan yang berbasis digitalisasi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, inklusif, dan efisien; - digitalisasi pelayanan publik; - pengembangan talenta digital pelayanan publik; - penguatan ekosistem digital pelayanan publik; dan - perluasan akses pelayanan public

Kementerian Komunikasi dan Informatika mengumumkan persiapan program prioritas guna mendukung percepatan transformasi digital di Indonesia, sehingga mendorong masyarakat Tanah Air menjadi masyarakat digital.

Kelima program tersebut terdiri dari:

- Program Penyediaan Infrastruktur TIK
- Program Pengelolaan Spektrum Frekuensi, Standar Perangkat, dan Layanan Publik
- Program Pemanfaatan TIK
- Program Komunikasi Publik
- Program Transformasi Ekonomi dan Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Ketangguhan Diplomasi
- Pemetaan Potensi Daerah Sasaran DTS 2025

Program-program tersebut merupakan bagian dari agenda nasional Pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Selain itu Kemenkominfo melakukan percepatan infrastruktur dengan pembangunan Base Transceiver Station (BTS) serta akses internet di wilayah non-komersial. Kemenkominfo juga melakukan persiapan pusat data nasional sebagai Langkah percepatan digitalisasi nasional, operasional layanan publik.

Kemenkominfo juga menargetkan seluruh desa dan kelurahan seluruh Indonesia sudah terjangkau dengan layanan 4G. Dan menargetkan 25% dari total pengguna smartphone saat ini di Indonesia menggunakan Aplikasi Peduli Lindungi.sumber; Medcom.id.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Diskominfo

Adapun tujuan sasaran dari Rencana Kerja Diskominfo Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tujuan Perangkat Daerah :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik Berbasis Elektronik

Sasaran Perangkat Daerah :

- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
- Meningkatkan Layanan Informasi Publik
- Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD
- Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi
- Meningkatnya keamanan informasi daerah

Tabel 3.2
Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025

No.	Urusan	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Non Urusan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Predikat SAKIP	BB
2.	Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Meningkatkan Layanan Informasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89,33
			Meningkatnya Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada PD	Persentase Perangkat Daerah yang saling terkoneksi jaringan intra Pemerintah Daerah	73
				Persentase Pengelolaan SPBE	62,50
3.	Urusan Pemerintahan Bidang Statistik		Meningkatnya kualitas data statistic sectoral dan terintegrasi	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	70
				Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	70
4.	Urusan Pemerintahan Bidang Statis		Meningkatnya keamanan informasi daerah	Indeks KAMI	Tinggi

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 maka diperlukan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan. Dalam merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar dalam penyusunannya yaitu :

- a) Keserasian dan keterpaduan pembangunan Diskominfo dalam kerangka pencapaian Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023– 2026.
- b) Adanya sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai program dan kegiatan. Secara garis besar 5 program, 12 kegiatan dan 45 sub kegiatan Renja Diskominfo Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didukung 8 Kegiatan yaitu :

- 1.1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- 1.3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
- 1.4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- 1.5 Administrasi Umum Perangkat Daerah
- 1.6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1.7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1.8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik didukung 1 Kegiatan yaitu :

- 2.1 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika didukung 1 Kegiatan yaitu :

- 3.1 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral didukung 1 Kegiatan yaitu :

- 4.1 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi didukung 1 Kegiatan yaitu :

5.1 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Berikut rincian Rencana Kerja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika pada Tahun 2025.

Tabel 3.3
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Indikator Kinerja

No	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Predikat SAKIP Pemerintahan Daerah	Predikat SAKIP	BB
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23 Dokumen/Laporan
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen (RKA APBD,Pergeseraan dan P-APBD)
	2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan (LKPj,LAKIP,LPPD)
	3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan (Evaluasi Renja,SAKIP)
	4 Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen
	5 Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen/Laporan administrasi keuangan daerah	40 Dokumen
	1 Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan
	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen
	3 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
	4 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 Laporan
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1 Laporan
	1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur	75%

N o	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	2.		3.	4.	5.
	1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket
	2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen
	3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang
	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	75 %
	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
	2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
	3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket
	4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan
	5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	15 Dokumen
	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemda	Jumlah Barang Milik Daerah yang dikelola	1 Unit
	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit
	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	18 Laporan
	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan
	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan
	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan
	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang terpelihara	53 Unit
	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit
	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit
	3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit
	4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	1 Unit

N o	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	2.		3.	4.	5.
		Bangunan Lainnya.	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi	
2.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik		Terlaksananya Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Informasi Publik yang dipublikasikan	89.33%
	1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	89,33%
	1	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	3 Laporan
	2	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	1 Komunitas
	3	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	2 Permohonan
	4	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	2 Rekomendasi
	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	5 Media
	6	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	2 Konten
3.	Pengelolaan Aplikasi Informatika		Terkelolanya Aplikasi Informatika	Persentase Pengelolaan Aplikasi Informatika	73%
	1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
	2	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Terlaksananya koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	1 Dokumen
	3	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	...Aplikasi
	4	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota.	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	37 Perangkat Daerah
	5	Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE.	Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	37 Perangkat Daerah
4.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral		Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
	1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	...Orang

N o	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan		Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	2.		3.	4.	5.
	2	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Meningkatnya kualitas data Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	...%
	3	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Terwujudnya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	..Dokumen
5.	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Tinggi (...)
	1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%
	1	pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	..Laporan
	2	pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	..Laporan
	3	penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	...Perangkat Daerah

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMINFO

=====

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun mengampu Urusan Unsur Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian. Program-program Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2025 mendukung prioritas pembangunan “Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan kepada Masyarakat” sebagaimana tertuang pada RPD Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026. Adapun prioritas program yang akan dilaksanakan tahun 2025 adalah **5 Program 12 kegiatan dan 44 sub kegiatan** dengan rincian sebagai berikut :

Urusan Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

1. Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri dari 8 kegiatan dan 27 sub kegiatan

2.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
- 2.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD
- 2.1.3. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2.1.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral
- 2.1.5. Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah

2.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 2.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
- 2.2.2. Sub kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- 2.2.3. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 2.2.4. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD

2.3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 2.3.1. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

2.4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

2.4.1. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya

2.4.2. Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian

2.4.3. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.

2.5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

2.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

2.5.2. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

2.5.3. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

2.5.4. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

2.5.5. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

2.6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.6.1. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor/Bangunan lainnya.

2.7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2.7.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2.7.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

2.7.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.7.4. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

2.8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2.8.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2.8.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

2.8.3. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

2.8.4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari 1 kegiatan dan 6 sub kegiatan :

- 1.1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun.
- 1.1.1. Sub kegiatan Relasi Media
- 1.1.2. Sub kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 1.1.3. Sub kegiatan Pelayanan Informasi Publik
- 1.1.4. Sub kegiatan Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
- 1.1.5. Sub kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 1.1.6. Sub kegiatan Penyusunan Konten

3. Program Aplikasi Informatika terdiri dari 1 kegiatan dan 5 sub kegiatan

- 2.1. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 2.1.1. Sub kegiatan Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di Lingkungan Pemda
- 2.1.2. Sub kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi
- 2.2.3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah
- 2.1.4. Sub kegiatan Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota.
- 2.1.5. Sub kegiatan Penyediaan Akses Internet Untuk Perangkat Daerah dalam rangka Penyelenggaraan SPBE.

Urusan Statistik

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan

- 3.1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
- 3.1.1. Sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 3.1.2. Sub kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- 3.1.3. Sub kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia.

Urusan Persandian

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi terdiri dari 1 kegiatan dan 3 sub kegiatan

- 4.1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 4.1.1. Sub kegiatan pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengelolaan sumber daya keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota
 - 4.1.2. Sub kegiatan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik
 - 4.1.3. Sub kegiatan penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota.

Adapun Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dalam Tabel IV (printout Renja SIPD dengan sumber dana berdasarkan Permendagri 90 tahun 2019 beserta pemutakhirannya) berikut ini :

Tabel 4.1
Renja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Sarolangun Tahun 2025

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Sarolangun Tahun Anggaran 2025

Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika

Rincian Anggaran Belanja Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Komunikasi dan Informatika														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				Rp. 953.920.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 953.920.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 953.920.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 953.920.000,00	Rp. 1.200.000.000,00
2	16	02	2.01	0014	Relasi Media	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 817.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 817.500.000,00	Rp. 1.000.000.000,00
2	16	02	2.01	0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 11.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 11.000.000,00	Rp. 10.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	02	2.01	0017	Pelayanan Informasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 55.400.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 55.400.000,00	Rp. 75.000.000,00
2	16	02	2.01	0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
2	16	02	2.01	0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 16.220.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 16.220.000,00	Rp. 45.000.000,00
2	16	02	2.01	0023	Penyusunan Konten	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 43.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 43.800.000,00	Rp. 45.000.000,00
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI				Rp. 1.399.318.150,00	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.459.318.150,00	Rp. 1.845.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
					INFORMATIKA									
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 1.399.318.150,00	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.459.318.150,00	Rp. 1.845.000.000,00
2	16	03	2.02	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 287.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 287.200.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	16	03	2.02	0017	Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
2	16	03	2.02	0021	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.990.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.990.000,00	Rp. 15.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	16	03	2.02	0024	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 107.128.150,00	Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 167.128.150,00	Rp. 300.000.000,00
2	16	03	2.02	0030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 960.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 960.000.000,00	Rp. 1.300.000.000,00
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp. 5.404.656.281,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 5.414.656.281,00	Rp. 6.035.500.000,00
2	16	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				Rp. 52.875.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 52.875.000,00	Rp. 170.000.000,00
2	16	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua		Rp. 12.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 12.750.000,00	Rp. 75.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Kel/Desa							
2	16	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 15.000.000,00	Rp. 35.000.000,00
2	16	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.640.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 8.640.000,00	Rp. 15.000.000,00
2	16	01	2.01	0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 6.750.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 6.750.000,00	Rp. 25.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N				Tahun + 1	
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer		Jumlah (Rp)
2	16	01	2.01	0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 9.735.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 9.735.000,00	Rp. 20.000.000,00
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				Rp. 4.443.356.606,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 4.443.356.606,00	Rp. 4.055.000.000,00
2	16	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Alokasi Umum (DAU) DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.300.396.606,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 4.300.396.606,00	Rp. 3.800.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 102.960.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 102.960.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	16	01	2.02	0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.500.000,00	Rp. 20.000.000,00
2	16	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.500.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.500.000,00	Rp. 35.000.000,00
2	16	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				Rp. 1.980.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 1.980.000,00	Rp. 2.500.000,00
2	16	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.980.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 1.980.000,00	Rp. 2.500.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				Rp. 94.080.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 94.080.000,00	Rp. 236.000.000,00
2	16	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 24.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 24.000.000,00	Rp. 30.000.000,00
2	16	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.080.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 20.080.000,00	Rp. 6.000.000,00
2	16	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 50.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 50.000.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah				Rp. 279.629.835,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 279.629.835,00	Rp. 359.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.252.875,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 7.252.875,00	Rp. 8.000.000,00
2	16	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 84.295.415,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 84.295.415,00	Rp. 90.000.000,00
2	16	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 14.881.545,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 14.881.545,00	Rp. 25.000.000,00
2	16	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 100.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 100.000.000,00	Rp. 170.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 73.200.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 73.200.000,00	Rp. 66.000.000,00
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Rp. 0,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 10.000.000,00	Rp. 295.000.000,00
2	16	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 200.000.000,00
2	16	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 0	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 70.000.000,00
2	16	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua		Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 10.000.000,00	Rp. 25.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
							Kel/Desa							
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 231.974.840,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 231.974.840,00	Rp. 488.000.000,00
2	16	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 3.000.000,00	Rp. 8.000.000,00
2	16	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 143.768.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 143.768.000,00	Rp. 200.000.000,00
2	16	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.206.840,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 25.206.840,00	Rp. 60.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 60.000.000,00	Rp. 220.000.000,00
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Rp. 300.760.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 300.760.000,00	Rp. 430.000.000,00
2	16	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 51.240.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 51.240.000,00	Rp. 55.000.000,00
2	16	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 106.080.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 106.080.000,00	Rp. 75.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	16	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 81.530.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 81.530.000,00	Rp. 150.000.000,00
2	16	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 61.910.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 61.910.000,00	Rp. 150.000.000,00
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				Rp. 158.788.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 158.788.000,00	Rp. 180.000.000,00
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 158.788.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 158.788.000,00	Rp. 180.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	20	02	2.01	0007	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.388.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 30.388.000,00	Rp. 45.000.000,00
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				Rp. 241.330.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 241.330.000,00	Rp. 290.000.000,00
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				Rp. 241.330.000,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 0,00	Rp. 241.330.000,00	Rp. 290.000.000,00
2	21	02	2.01	0002	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 67.530.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 67.530.000,00	Rp. 65.000.000,00

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun – 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	21	02	2.01	0003	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 13.000.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 13.000.000,00	Rp. 25.000.000,00
2	21	02	2.01	0004	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dana Alokasi Umum (DAU)	Kab. Sarolangun, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 160.800.000,00	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 0	Rp. 160.800.000,00	Rp. 200.000.000,00
Jumlah									Rp. 8.158.012.431,00	Rp. 70.000.000,00			Rp. 8.228.012.431,00	Rp. 9.550.500.000,00

Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025 merupakan landasan, pedoman dan acuan yang berisikan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.

Pada Bab ini Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sarolangun Tahun 2025 mencakup tiga bahasan yaitu :

a. Catatan Penting

Proses penyusunan maupun pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Sarolangun telah dan akan selalu melibatkan peran *stakeholder* atau pemangku kepentingan. Pelibatan *stakeholder* dalam proses perencanaan dapat dilihat dari proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Desa hingga Musrenbang Tingkat Kecamatan dan selanjutnya di proses dalam Forum SKPD Tingkat Kabupaten hingga Pusat.

Selanjutnya Rencana Kerja ini menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025. Prioritas program/kegiatan diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, juga diarahkan guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Selain itu juga dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Namun demikian besaran pagu anggaran setiap program/kegiatan menyesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada.

b. Kaidah Pelaksanaan

Perencanaan yang baik dan dapat dijadikan dasar pelaksanaan adalah kunci sukses pembangunan daerah, dalam artian kualitas suatu produk perencanaan dapat mendukung keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan pembangunan daerah, dengan prasyarat dokumen perencanaan ini ditaati oleh seluruh pelaku pembangunan dengan komitmen dan konsistensi yang tinggi serta menjadi acuan atau proses selanjutnya. Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat, kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (*stakeholders*), tetap harus di kedepankan.

c. Rencana Tindak lanjut

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk mencapai suatu kondisi yang lebih baik dimasa yang akan datang dengan memanfaatkan dan mengelola potensi dan sumberdaya yang dimiliki. Upaya pembangunan tersebut pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk menjamin agar program kegiatan pada pelaksanaannya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan maka diperlukan instrumen pengendalian yang berfungsi untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi, dan Informatika sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan mutlak diperlukan, sehingga masing-masing dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pembangunan. Komitmen, konsistensi, disiplin, kerja keras, semangat, dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Dinas Komunikasi dan Informatika mutlak diperlukan untuk tercapainya sasaran PD Tahun 2025 menuju «SMART GOVERNMENT»

Dalam penyusunan Renja ini dirasa jauh dari kesempurnaan, diharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun untuk dokumen ini.

Sarolangun, 31 Desember 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN SAROLANGUN

AHMAD NASRI, S.H
Pembina Utama Muda / IV.c

